

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh Bappedalitbang Kabupaten Banyumas belum optimal. Perincian sebagai berikut:

1. Aspek komunikasi

Aspek komunikasi dalam pelaksanaan koordinasi sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi dari Bappedalitbang kepada OPD. Selain itu, proses komunikasi yang dilakukan didukung dengan tersedianya sarana dan wadah berupa rapat FGD atau forum OPD serta berupa WhatsApp grup dan email. Namun, masih ditemukan kendala dalam menyampaikan informasi sehingga pesan yang disampaikan dari Bappedalitbang yang tidak dipahami dengan benar oleh OPD.

2. Aspek Kerjasama

Aspek kerjasama dalam pelaksanaan koordinasi sudah berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesepakatan awal penyusunan maupun kesepakatan mengenai program lanjutan. Selain itu, kerjasama lain berupa rekapitan laporan dari masing-masing OPD ke Bappedalitbang yaitu dokumen hasil realisasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan laporan triwulan melalui e-monev.

3. Aspek Sinkronisasi

Aspek sinkronisasi dalam pelaksanaan koordinasi sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterpaduan antara Renja dengan Renstra bahwa sudah dipastikan kegiatan dan sub kegiatan sudah selaras dengan Renstra. Keterpaduan anggaran sudah sesuai dengan Renstra. Selain itu, tersedianya kegiatan check and balance berupa verifikasi Renja OPD dan terkait triwulanan. Namun, masih ditemukan kendala data yang berbeda sehingga menghambat proses perencanaan

4. Aspek Kesatuan Tindakan

Aspek kesatuan tindakan dalam pelaksanaan koordinasi sudah berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya jadwal penyusunan antara Bappeda dan OPD. Selain itu, kesatuan tindakan juga terlihat pada saat penyusunan dokumen, penginputan data dan pengumpulan Renja OPD kepada Bappedalitbang.

5. Aspek Pembagian Tugas

Aspek pembagian tugas dalam pelaksanaan koordinasi sudah berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari sudah sesuai dengan tupoksi serta sudah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016. Selain itu, pemahaman tugas sudah dipahami dengan jelas oleh OPD karena dalam penyusunannya berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Faktor mempengaruhi pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas sebagian berikut:

5. Faktor Disiplin

Aspek faktor disiplin sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari faktor disiplin mempengaruhi aspek kesatuan tindakan, dengan tersedianya SOP sebagai panduan penyusunan rencana kerja sehingga organisasi perangkat daerah ketika menyusun Renja terdapat kesamaan dalam proses penyusunan. Faktor disiplin mempengaruhi aspek kerjasama dapat diketahui dari ketepatan waktu saat proses penyusunan RKPD. Ketepatan waktu dapat menghindari keterlambatan dalam kerjasama penyusunan Renja dan RKPD. Namun, pada ketepatan waktu masih ditemukan keterlambatan dalam pengajuan Renja maka dari itu keterlambatan belum dapat menunjang proses penyusunan RKPD.

7. Faktor Tingkat formalitas

Aspek faktor tingkat formalitas sudah berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat faktor tingkat formalitas mempengaruhi aspek komunikasi, dengan terdapat notulensi rapat maka informasi yang diberikan dapat dipahami dengan jelas antara dua belah pihak yaitu Bappeda dan OPD. Tingkat formalitas juga mempengaruhi aspek komunikasi, dengan terdapat tempat penyimpanan hasil notulensi maka memudahkan dalam melihat kembali informasi yang telah disepakati antara dua pihak.

5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan, implikasi yang dapat dikemukakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Aspek komunikasi, diperlukan upaya untuk meningkatkan kejelasan dalam penyampaian informasi serta memastikan bahwa pesan disampaikan dengan cara yang dapat dipahami oleh semua pihak dari Bappedalitbang ke OPD.
2. Aspek kerjasama yang dilakukan Bappeda dan OPD terkait sudah baik, hanya perlu ditingkatkan keterlibatan perangkat daerah pada saat kesepakatan ataupun pengambilan keputusan.
3. Aspek sinkronisasi yang dilakukan Bappeda terkait sudah baik, hanya perlu ditingkatkan pada kegiatan *check and balance* terutama pada anggaran sehingga dapat memaksimalkan kemampuan daerah. Perlu memastikan bahwa informasi yang diinput atau disajikan oleh setiap pihak akurat dan sesuai satu sama lainnya.
4. Aspek kesatuan tindakan yang dilakukan sudah baik, hanya perlu ditingkatkan pada saat koordinasi internal baik Bappeda maupun OPD terkait.
5. Aspek pembagian kerja yang dilakukan sudah baik, hanya perlu mengadakan pembekalan agar menambah potensi OPD terkait perencanaan pembangunan terutama dalam penyusun dokumen perencanaan.

6. Aspek faktor disiplin perlu ditingkatkan terkait budaya kedisiplinan karena mempengaruhi terhadap kerjasama dan kesatuan tindakan. Sehingga dapat mewujudkan koordinasi yang baik dalam penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas.
7. Aspek faktor tingkat formalitas perlu ditingkatkan karena mempengaruhi komunikasi. Sehingga informasi hasil rapat dapat tersimpan dengan baik serta lebih terintegrasi.

